



ABSTRAK

Gelombang desentralisasi dan demokratisasi di kota Surakarta telah berjalan dua dekade sekaligus menjadi narasi bagi kontestasi aktor maupun perubahan kebijakan kota. Transisi politik di akhir Orde Baru menjadi momentum bagi agenda Reformasi untuk mendorong implementasi otonomi sekaligus Pilkada sebagai proses demokrasi elektoral ditingkat lokal sekaligus. Melacak dinamika dua dekade kota Surakarta beserta kontestasi aktor maupun struktur kebijakan, berbasis kerangka analisa Giddens tentang strukturasi-dualitas struktur. Analisa hubungan aktor dan struktur sebagai dualitas, sedianya bisa mengurai kompleksitas ditingkat lokal sekaligus menghadirkan beragam bentuk kontestasi antar aktor maupun kepentingan terkait struktur kebijakan kota, pada tahun 1999-2019. Memahami dua dekade dinamika kota berkontribusi pada skema tali temali aktor, kepentingan maupun orientasi pengelolaan kebijakan kota. Studi ini dilakukan dengan pendekatan etnografi, dimana proses panjang observasi pada beragam agenda kota diletakkan secara dinamis bersamaan analisa dan review arsip dan literatur kota. Pendekatan simpul-simpul tindakan aktor, diskursus, kepentingan maupun hubungannya dengan struktur kebijakan kota dikaji dalam lingkup analisis domain. Adapun hasil akhir dari studi ini menunjukkan transisi desentralisasi dan demokratisasi menjadi ruang kontestasi aktor dan membentuk konfigurasi struktur kebijakan kota yang dinamis. Pada dekade awal, agenda perencanaan pembangunan partisipatif menjadi komitmen kota dengan dorongan aktor masyarakat sipil untuk merespon tuntutan otonomi daerah dan afirmasi isu kesejahteraan. Inklusi aktor dan kontestasinya pada proses pengambilan kebijakan yang direntang pada dekade pertama bertransformasi bersamaan praktek demokrasi elektoral. Memasuki dekade kedua, kehadiran aktor berlatarkan ekonomi bisnis secara bertahap menjadi aktor dominan dalam diskursus diruang publik dan proses pengambilan kebijakan diranah kota dengan mempromosikan wisata MICE. Dua dekade perubahan kota, menghadirkan analisa reproduksi ruang-ruang kota yang mengalami defisit isu-isu publik dan berimplikasi secara mendasar pada proses demokratisasi. Kontestasi dalam putaran praktek elektoral yang ada menghasilkan dominasi dan representasi aktor kota berlatar ekonomi dengan kepentingan bisnis. Bertahap, kota bertransformasi menjadi ruang bagi aktor dengan latar ekonomi yang massif mereproduksi struktur kebijakan, melegitimasi kepentingannya secara kelembagaan sekaligus menarasikan perubahan dalam dua dekade terakhir di kota Surakarta.

Kata kunci : Kota, Aktor, Struktur Kebijakan, Desentralisasi, dan Demokratisasi



ABSTRACT

Decentralization and democratization wave has run for two decades in Surakarta City and has been a narrative to the contestation of actors and the change of city policy. Political transition in the end of New Order was a momentum to Reformation agenda to encourage the implementation of autonomy and Local Leader Election (Indonesian: *Pilkada*) all at once to be electoral democratic process at local level. This study traced the two dynamic decades in Surakarta City along with the contestation of actors and policy structure, based on Giddens's framework of analysis on structuring- dual structure. Analysis of the relationship between actor and structure as duality should be able to disentangle complexity at local level and to present a variety of contestation between actors and interest related to the structure of city policy in 1999-2019. It tried to understand the contribution of city's two dynamic decades to the study on the relation of actors, interests, and city policy management orientation. This study was conducted using ethnographic approach, in which a long observation was conducted on various city agenda put dynamically along with analysis and review on city archive and literature. The knot of actor's action, discourse, interest, and its relation to the city policy structure is studied in domain analysis. The result of study showed that the transition of decentralization and democratization into the space of actor contestation and created the dynamic configuration of city policy structure. In early decade, participative development planning agenda became the city's commitment with support from civil society actor to respond to the local autonomy demand and the affirmation of welfare issue. The inclusion of actor and its contestation into policy making process in the first decade transforms along with the electoral democratic practice. Entering into the second decade, the presence of actor with business economic background became dominant actor gradually in the discourse in public space and policy making process in city domain by promoting MICE tour. The change of city in two decades presents the analysis on the reproduction of urban spaces encountering public issue deficit and has implication fundamentally to democratization process. Contestation in electoral practice circle existing results in domination and representation of city actors with economic background and business interest. Gradually, city transforms into the space for the actors with economic background, reproducing massively the policy structure, legitimizing their interest institutionally, and narrating the change in the last two decades in Surakarta City.

Keywords : City, Actor, Policy Structure, Decentralization, and Democratization